



## Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Bontoala Kab. Gowa Dalam Mewujudkan Pembangunan

**Muh. Rais Mukram Latif**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

[muhr7348@gmail.com](mailto:muhr7348@gmail.com)

**Ansyarif Khalid**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

[h.ansyarief@yahoo.com](mailto:h.ansyarief@yahoo.com)

**Saida Said**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

[saida.said1072@gmail.com](mailto:saida.said1072@gmail.com)

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontoala. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari “Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Bontoala Kab. Gowa Dalam Mewujudkan Pembangunan” menunjukkan bahwa 1) Pengimplementasian Alokasi Dana Desa Di Desa Bontoala sudah berjalan efektif. 2) Kontribusi yang di hasilkan dari Alokasi Dana Desa juga sudah terpenuhi dengan partisipasi dari toko masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta tokoh perempuan saat merencanakan anggaran tersebut. .3) Faktor yang menghambat pengimple-mentasian adalah banyaknya masyarakat yang belum faham tujuan dari pembangunan yang dibangun pemerintah desa sehingga menghambat ber-jalannya pembangunan di desa bontoala

**Kata Kunci:** *Implementasi, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa*

**Abstract.** *The aim of this research is to find out how village fund allocation is managed in Bontoala Village. Data collection techniques in this research were observation, interviews and documentation. Results of the Implementation of Village Fund Allocation in Bontoala Village, Kab. Gowa in Realizing Development" shows that 1) Implementation of Village Fund Allocation in Bontoala Village has been effective. 2) Contributions generated from the Village Fund Allocation have also been fulfilled with the participation of community shops, religious leaders, youth leaders and women leaders when planning the budget. .3) The factor that hinders implementation is that many people do not understand the objectives of the development built by the village government, thus hampering the progress of development in Bontoala village.*

**Keywords:** *Implementation, Village Fund Allocation, Village Development*

## **PENDAHULUAN**

Implementasi alokasi dana desa adalah bagaimana dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada desa untuk mendorong pembangunan lokal digunakan. Proses ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan dan efektif untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Beberapa hal dapat menghambat penggunaan Dana Desa dengan sukses. Yang pertama adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang mengakibatkan ketidakjelasan tentang bagaimana dana digunakan, dan kurangnya mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau korupsi. Yang kedua adalah keterbatasan kapasitas pengelolaan, yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Ada tiga hal yang dapat menyebabkan proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal jika tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemantauan. Empat, desa mungkin menghadapi kesulitan dalam merencanakan dan menjalankan proyek dengan baik jika mereka tidak menerima dukungan teknis yang memadai dari pemerintah daerah atau lembaga terkait. Faktor Lima, Korupsi, dan Penyalahgunaan dapat menyebabkan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan masyarakat terkuras. Enam, Kepemimpinan yang tidak stabil Tujuh, tidak cukup sumber daya. Delapan, Hambatan Infrastruktur dan Akses Sembilan, Kondisi Eksternal: Faktor-faktor eksternal, seperti bencana alam atau konflik, dapat mengganggu pelaksanaan proyek dan program.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan adalah semua bagian dari pengelolaan keuangan desa. Perencanaan: dalam kamus besar bahasa Indonesia, "rencana" didefinisikan sebagai "maksud", "niat", "ancangan", dan "buram" (konsep atau rangka kerja yang akan dilakukan).

Penganggaran: Setelah RKP desa ditetapkan, APBD desa disusun. Rencana kegiatan dan rencana anggaran yang ditetapkan dalam RKP pedesaan digunakan sebagai dasar penganggaran. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah rencana anggaran tahunan pemerintah desa yang bertujuan untuk melaksanakan rencana dan kegiatan di wilayah hukum desa.

Pelaksanaan: Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan membuka rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Pemerintah Desa dan Kepala Urusan Keuangan menandatangani rekening kas desa. Penatausahaan: Kepala Urusan Keuangan, sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa untuk semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan. Menurut Moleong (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, di mana antara individu dengan latar atau konteks alami, dan bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Selain itu, peneliti sendiri menjadi alat penting dalam penelitian karena penelitian bergantung pada pengamatan peneliti di suatu wilayah tertentu. Hanya peneliti yang dapat berinteraksi dengan orang-orang di wilayah tersebut, baik dalam bahasanya maupun dalam peristilahannya, yang menjadikannya instrumen utama dalam penelitian mereka.

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di Desa Bontoala, yang terletak di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Lokasi penelitian dipilih karena dianggap dapat mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Akibatnya, peneliti dapat bertemu langsung dengan para subjek dalam penelitian ini.

Penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini akan dilakukan di desa Bontoala, di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Tujuan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat membantu meningkatkan pembangunan di Desa Bontoala. Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama dua hingga tiga bulan.

Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan:

1. Observasi: Teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar terjadi di Kantor Desa Towara Pantai dan di Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan lebih akurat tentang gejala-gejala yang terjadi di objek penelitian ini.
2. Wawancara. Teknik ini melibatkan tanya jawab langsung antara dua atau lebih orang. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan atau responden. Peneliti menggunakan aplikasi voice recorder di handphone merekam hasil wawancara responden. Selain itu, peneliti menggunakan alat tulis, termasuk ballpoint dan buku, untuk menulis poin penting yang disampaikan responden. Diminta agar responden memberikan informasi dalam bentuk fakta yang terjadi, pendapat yang ingin disampaikan, sikap, dll.
3. Teknik Dokumentasi: Teknik ini mengumpulkan data dengan mempelajari, mencatat, atau membuat salinan dari dokumen dan arsip yang relevan. Dalam pedoman dokumentasi, peneliti menggunakan ponsel untuk mendukung data yang mereka peroleh dari wawancara dan observasi mereka. Peneliti mengambil foto setiap saat penting untuk mendukung hasil penelitian.

Analisis data adalah proses mengolah data. Dalam analisis ini, data diperoleh, diproses, dan digunakan untuk menyimpulkan masalah yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa teknik analisis data digunakan, termasuk

1. Reduksi Data: Analisis ini melibatkan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat dibuat kesimpulan akhir. Tidak perlu mengartikan reduksi sebagai jumlah data.
2. Penyajian Data: Salah satu bagian dari pelaporan hasil penelitian adalah penyediaan data, yang dilakukan agar data dapat dipahami dan dianalisa sesuai dengan tujuan. Data biasanya disajikan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Kesimpulan: Salah satu teknik kualitatif dan analisis adalah penarikan kesimpulan. membuat kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyajian Hasil Data

Tim pelaksana Desa sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD. Dalam menerapkan ADD, mereka harus berkomunikasi dengan seluruh masyarakat. Pemerintah Desa berusaha meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memberikan informasi ini kepada publik. Tabel berikut menunjukkan hasil pembangunan yang didanai ADD di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Implementasi Dana Desa Untuk Pedesaan

**Tabel 4.2 Data ADD Pembangunan Desa Bontoala Tahun 2023**

| <b>Pembangunan Desa</b>                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sub Bidang Pendidikan</b>                                                                 |                   |
| Penyelenggaraan Paud/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, DLL) | Rp 37.742.100,00  |
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat                                          | Rp 70.271.000,00  |
| Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi                                            | Rp 4.000.000,00   |
| <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                                                  |                   |
| Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, Dsb)             | Rp 12.525.850,00  |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)                       | Rp 127.151.500,00 |
| Penyuluhan dan pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga Kader Kesehatan Dll)           | Rp 22.750.000,00  |
| Pembangunan Rehabilitas/ Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD        | Rp 21.854.475,00  |
| <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                          |                   |
| Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman                    | Rp 384.726.750,00 |
| Pembuatan/Pemutakhiran Peta wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)                                | Rp 10.575.000,00  |
| <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>                                                          |                   |
| Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum/DLL                                              | Rp 36.339.102,00  |
| Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah                            | Rp 127.740.750,00 |

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk pembangunan desa sekitar Rp. 855.676.527 yang dimana sudah terealisasi 50% dan sisanya yaitu Rp. 427.838.263 yang belum terpakai dikarenakan pada tahun 2022 pembangunan sudah 86% tercapai dari total dana Rp. 680.696.500 dan yang terealisasi sebesar Rp. 587.814.100

### Implementasi Dana Desa Bid. Penyelenggaraan Desa

**Tabel 4.3 Data ADD Bidang Penyelenggaraan**

| <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Penyelenggaraan Belanja SILTAP, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan</b>                               |                   |
| Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa                                                      | Rp 26.500.000,00  |
| Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa                                                              | Rp 304.800.000,00 |
| Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa                                                          | Rp 1.045.200,00   |
| Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian                   | Rp 52.305.764,00  |
| Tunjangan BPD                                                                                               | Rp 113.400,00     |
| Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam Perjalanan, Listrik Dll | Rp 6.713.138,00   |
| Insentif/ Operasional RT/RW                                                                                 | Rp 150.600.000,00 |
| <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                                                        |                   |
| Penyediaan Sarana ( Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan                                                   | Rp 31.858.000,00  |
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa                                                                   | Rp 79.092.050,00  |
| <b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan</b>                                         |                   |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa Dll)                                                 | Rp 5.880.000,00   |
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDES, APBDES Perubahan, LPJ, Dll)                                       | Rp 13.636.920,00  |

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sekitar Rp. 838.408.451 yang dimana sudah terealisasi 50% dan sisanya yaitu Rp. 419.204.230 yang belum terpakai dikarenakan pada tahun 2022 pembangunan sudah 96% tercapai dari total dana Rp. 729.079.700 dan yang terealisasi sebesar Rp. 697.732.600 sisanya Rp. 31.347.100

1. Implementasi Dana Desa Bid. Penanggulangan Bencana Desa

**Tabel 4.4 Data ADD Dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak desa**

| <b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa</b> |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sub Bidang Penanggulangan Bencana                                |                     |
| Kegiatan Penanggulangan Bencana                                  | Rp<br>25.000.000,00 |
| Sub Bidang Keadaan Mendesak                                      |                     |
| Penanganan Keadaan Mendesak                                      | Rp<br>35.600.000,00 |

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sekitar Rp. 460.600.000 yang dimana belum terealisasi dikarenakan tidak adanya bencana yang terjadi di desa bontoala 2023 begitu pula pada tahun 2022 sebesar 727.200.000 yang juga tidak terealisasi karena tidak terjadi bencana pada tahun tersebut

## 2. Implementasi Dana Desa Bid. Pembinaan kemasyarakatan Desa

**Tabel 4.5 Data ADD Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

| <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat | Rp<br>21.600.000,00 |

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk pembinaan kemasyarakatan sekitar Rp. 21.600.000 yang dimana sudah terealisasi 50% dan sisanya yaitu Rp. 10.800.000 yang belum terpakai dikarenakan pada tahun 2022 pembinaan kemasyarakatan sudah tercapai 75% dari total dana Rp. 21.600.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 16.200.000 sisanya Rp. 5.400.000

## Implementasi Dana Desa Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa

**Tabel 4.6 Data ADD Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

| <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sub Bidang Kelautan dan Perikanan                                           | Rp 8.270.000,00   |
| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan                                         |                   |
| Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa DII)                  | Rp 302.556.000,00 |
| Pelatihan Bimtek/Pengenalan/Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan | Rp 39.630.000,00  |
| Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                              |                   |
| Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa                                        | Rp 14.994.000,00  |

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga         |                  |
| Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan                         | Rp 36.360.000,00 |
| Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal                                     | Rp 13.910.000,00 |
| Pelatihan Pengenalan BUM Desa (Pelatihan Yang Dilaksanakan oleh PEMDES) | Rp 36.380.000,00 |

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar Rp. 415.720.000 yang dimana sudah terealisasi 50% dan sisanya yaitu Rp. 207.860.000 yang belum terpakai dikarenakan pada tahun 2022 pemberdayaan Masyarakat sudah tercapai 100% dari total dana Rp. 385.916.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 385.881.000 sisanya Rp. 35.000.000

Dari data tersebut Diatas, hasil yang diperoleh di Desa Bontoala rata-rata dapat dibuktikan secara fisik. Evaluasi pelaksanaan rencana ADD juga memandu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan komentar dan koreksi atas pelaksanaan ADD. Serta tingkat penurunan kemiskinan juga sudah menurun 50% yang dimana ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 tersisa Rp. 100.000.000

## PEMBAHASAN

Kebijakan publik adalah kumpulan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat, menurut definisi woll yang dikutip oleh Hessel dalam Ahmad Subandi (2018: 21). Pertama, kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat; kedua, hasil kebijakan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk program; dan ketiga, bagaimana kebijakan berdampak pada kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan publik adalah tahap penting dalam proses kebijakan di mana rencana kebijakan diubah menjadi tindakan nyata. Ini melibatkan penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Implementasi dapat menjadi sulit karena melibatkan banyak orang, sumber daya yang terbatas, dan situasi yang kompleks. Langkah-langkah untuk Melaksanakan Kebijakan:

- 1) Perencanaan Implementasi: Ini adalah tahap di mana rencana pelaksanaan kebijakan dibuat. Penentuan tugas, alokasi sumber daya, jadwal, dan identifikasi pihak yang terlibat dalam implementasi adalah semua bagian dari ini.
- 2) Koordinasi: Untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja sama sesuai dengan rencana, banyak departemen, lembaga, dan pihak terkait bekerja sama untuk menerapkan kebijakan
- 3) Komunikasi: Komunikasi efektif sangat penting. Semua pihak terlibat dan masyarakat harus menerima informasi kebijakan secara jelas dan tepat waktu.
- 4) Pelaksanaan Tindakan: Rencana dilaksanakan. Ini dapat mencakup pembagian sumber daya, pelaksanaan program, atau perubahan peraturan.
- 5) Pemantauan: Proses ini mencakup pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kebijakan. Perbaikan dapat dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian dengan rencana.

- 6) Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan telah dicapai.

Berdasarkan diskusi dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan Dana Desa di Desa Bontoala sudah berjalan efektif karena banyak masyarakat mendapat manfaat dari banyak pembangunan fisik dan non-fisik yang dimana sesuai dengan prokernya diantaranya yang secara fisik adalah paving blok, dan drainase.
2. Dalam proses perencanaan anggaran, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan telah berkontribusi pada kontribusi Alokasi Dana Desa.
3. Faktor yang menghambat pelaksanaan adalah fakta bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami tujuan dari pembangunan yang dibangun pemerintah desa, yang menghambat proses pembangunan di desa bontoala.

## **SIMPULAN**

1. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala telah dilaksanakan dengan baik.
2. Kontribusi dari ADD telah dipenuhi dengan partisipasi tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan saat merencanakan anggaran.
3. Faktor yang menghambat pelaksanaan adalah fakta bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami tujuan dari pembangunan yang dibangun pemerintah desa, yang menghambat proses pembangunan di desa bontoala

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adriana, I.N. (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ahmad, S. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Andini, W. (2020). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa.

Anggara, S, (Dkk). ((2016). Administrasi Pembangunan, Teori Dan Praktik. Cetakan I. Jawa Barat: Pustaka Setia.

Nain, U. (2021). Realisasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ika, R. A. (2020). Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Cetakan I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Pratiwi, O. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Raharjo, M. M. (2021). Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan Implementasi). Cetakan I. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Raharjo, M. M. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Cetakan I. Jakarta: PT Bumi Aksara

Rahmadana, . (2021). Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.

Subandi, A. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Unjirin. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima).